

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2. 1. Landasan Teori

2. 1. 1. Teori Keagenan

Teori keagenan adalah dasar teoritis yang mendasari praktik bisnis perusahaan selama bertahun-tahun yang berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi dan teori organisasi. Teori keagenan (*Agency Theory*) mengungkapkan adanya hubungan kepentingan antara prinsipal dan agen. Agen dikontrak untuk melakukan tugas khusus untuk prinsipal bersama dengan tanggung jawab untuk tugas yang diberikan. Prinsipal berkewajiban untuk memberikan penghargaan kepada agen atas layanan yang diberikan. Meskipun adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal yang dapat menimbulkan konflik, tetapi baik prinsipal maupun agen sama-sama ingin memaksimalkan keuntungan dan menghindari risiko (Belkaouli dalam Muthaher, 2019). Oleh karena itu, prinsipal harus mengawasi kerja agen agar tujuan organisasi pemerintah tercapai secara efisien dan efektif guna menciptakan akuntabilitas publik. (Adrian dan Erlina, 2019).

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam (Dewi dan Rini, 2018), hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa atas nama prinsipal dan untuk memungkinkan agen membuat keputusan terbaik bagi prinsipal. Teori keagenan juga menyatakan bahwa seorang agen biasanya memiliki sikap oportunitis dan cenderung menghindari risiko (*risk averse*). (Safitri dalam Muthaher, 2019).

Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk publik sebagai pihak prinsipal.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana juga bertanggung jawab dalam menyajikan laporan keuangan yang lengkap dan wajar serta membuka akses bagi pengguna laporan keuangan (*stakeholder*). Pemerintah daerah akan menghindari risiko berupa ketidakpercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja mereka. Pemerintah daerah juga berupaya untuk menunjukkan kinerja yang baik kepada masyarakat khususnya di bidang pengelolaan keuangan dengan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tentunya prinsipal sangat menginginkan hasil kinerja yang baik dari agen. Jika kinerja pemerintah baik, maka masyarakat akan mempercayai pemerintah. (Muthaher, 2019).

2. 1. 2. Nilai Informasi Laporan Keuangan

Pengertian laporan keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015:1) Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang kondisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi.

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan), laporan keuangan dalam PSAP 01 adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelapor. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercaya.

Menurut (Sutarman, 2012) informasi merupakan sekumpulan fakta (*data*) yang diorganisir dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi si penerima. Nilai informasi merupakan kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Untuk memenuhi manfaat dan tujuan penyampaian laporan keuangan pemerintah, informasi yang disajikan harus bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan. Informasi seharusnya hanya berguna bagi pengguna, dan informasi tersebut harus memiliki nilai. (Suwardjono dalam Dewi dan Rini, 2018).

Menurut (Sutarman, 2012), Nilai dari informasi ditentukan oleh lima hal yaitu:

1. Untuk memperoleh pemahaman dan manfaat.
2. Untuk mendapatkan pengalaman.
3. Pembelajaran yang terakumulasi sehingga dapat diterapkan untuk memecahkan suatu masalah atau proses bisnis tertentu.
4. Refleksikan pengalaman masa lalu yang mengekstrak makna signifikan dan memberikan pengetahuan yang terorganisir dan bernilai tinggi. Nilai ini dapat mencegah manajer melakukan kesalahan yang sama yang telah dilakukan manajer lain sebelumnya.
5. Informasi dikatakan bernilai jika manfaatnya lebih besar daripada biaya untuk mendapatkannya. Sebagian besar informasi tidak berharga, tetapi nilai kegunaannya dapat diapresiasi.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran preskriptif yang harus terkandung dalam informasi akuntansi untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan pemerintah antara lain:

1. Relevan

Informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi tersebut dikatakan relevan apabila:

a) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c) Tepat waktu

Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d) Lengkap

Mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi dapat dikatakan andal apabila :

a) Penyajian jujur, menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b) Dapat diverifikasi (*verifiability*), informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c) Netralitas, informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila nilai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, itu berarti pemerintah sudah mampu untuk mewujudkan akuntabilitas

dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah dan laporan keuangan yang dihasilkan akan terbebas dari kesalahan yang menyimpang. Sehingga para pengguna laporan keuangan akan lebih mudah dalam mengambil keputusan dari informasi yang didapat. Sebaliknya, apabila nilai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tidak sesuai dengan karakteristik yang disyaratkan maka akan menimbulkan permasalahan.

2. 1. 3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengendalian internal merupakan bagian dari fungsi manajemen. Penerapan sistem pengendalian intern harus dilakukan untuk menjamin agar kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu melalui penerapan sistem pengendalian intern akan terjadi penghematan, efisiensi, dan efektivitas kinerja. Informasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan operasional manajemen dan pengambilan keputusan. (Hanum, 2019).

Menurut COSO (2013) dalam Winarna et al., (2021) pengendalian internal merupakan proses yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan terwujudnya efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. SPIP merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mendorong akuntabilitas publik yang pembangunannya menerapkan konsep COSO (*Committee of Sponsoring Organizations*). Penerapan kerangka kerja COSO dalam pengembangan sistem pengendalian internal sejalan dengan kerangka kerja Internasional yang telah diadopsi oleh banyak negara dan efektivitasnya diterima secara luas di dunia akademis. (Benedek et al., 2014).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern, yang disingkat SPI adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan keandalan penyajian laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal pemerintah memiliki prinsip umum yang telah dikembangkan dalam penyelenggaraannya sebagai petunjuk kinerja dan tolak ukur untuk menguji efektivitas penerapan sistem pengendalian internal. Pengembangan prinsip umum tersebut harus memperhatikan aspek *cost* dan *benefit*, sumber daya manusia, sifat kekhususan desai penyelenggaraan SPIP, dan keterbatasan kompetensi auditor internal dalam menguatkan penyelenggaraan SPIP. Alasan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah untuk mengarahkan pelaksanaan reformasi keuangan Negara menuju tata pemerintahan yang baik. SPIP terdiri atas lima unsur yang berdasar terhadap unsur sistem pengendalian intern yang sudah diterapkan di wilayah pemerintahan menurut PERMENDAGRI No. 60 Tahun 2008, meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menghasilkan perilaku positif dan mendorong penerapan SPI di lingkungan kerjanya dengan menerapkan cara sebagai berikut:

- a) Penegakan integritas dan nilai-nilai etika
- b) Komitmen terhadap kemampuan
- c) Kepemimpinan yang mendukung
- d) Pembentukan struktur organisasi yang memenuhi kebutuhan
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat
- f) Menyiapkan dan menerapkan strategi pengembangan SDM yang baik
- g) Perwujudan peran perangkat penjagaan intern pemerintah yang tepat guna
- h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi Pemerintah terkait. Hubungan kerja yang baik diwujudkan melalui mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian risiko

Pemimpin instansi pemerintah harus mengidentifikasi secara efisien dan efektif terhadap bahaya yang dapat menghambat pencapaian tujuan, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Risiko yang teridentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen risiko dan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk meminimalisir risiko.

3. Aktivitas pengendalian

Pemimpin instansi pemerintah harus melakukan aktivitas pengendalian berdasarkan pada ukuran, kelengkapan, dan sifat dari tugas serba guna instansi pemerintah yang berkaitan.

4. Informasi dan komunikasi

Pemimpin instansi pemerintah harus menggunakan bentuk dan sarana komunikasi efektif dengan melakukan komunikasi dalam bentuk Tindakan yang positif saat berhubungan dengan pegawai diseluruh instansi dan memperlihatkan dukungan terhadap pengendalian intern.

5. Pemantauan dan pengawasan pengendalian internal

Pemimpin instansi pemerintah harus melaksanakan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan pengendalian intern akan dilakukan dengan perantara pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

Kelima unsur sistem pengendalian intern di atas merupakan unsur yang saling terkait antara satu dengan yang lain. Hal ini dikarenakan proses pengendalian intern menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan pegawai (Kuntadi et al., 2022). Sistem pengendalian internal pemerintah ditentukan oleh susunan organisasi, metode dan ukuran yang disesuaikan untuk melindungi kemampuan organisasi dalam memastikan keakuratan dan bisa diandalkannya data akuntansi, efisiensi dan kebijakan manajemen. Definisi pengendalian intern lebih menekankan pada tujuan yang ingin dicapai bukan unsur-unsur pengertian pengendalian intern di atas, karena sistem tersebut bekerja dengan baik untuk perusahaan yang menggunakan mesin akuntansi

untuk memproses informasi secara manual bukan hanya memanfaatkan komputer (Rohmah et al., 2020).

2. 1. 4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi sangat diperlukan dalam melakukan praktek pembukuan dan penyajian laporan keuangan. Teknologi informasi dapat membantu terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Ridzal et al., 2022). PP No 56 Tahun 2005 yang diubah menjadi PP No 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, mengharuskan tiap instansi pemerintah untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan terciptanya tata kelola keuangan daerah yang baik guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat bagi para pemangku kepentingan.

Teknologi informasi merupakan suatu bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu untuk membuat, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan dan/atau mengirimkan informasi (Suyanto, 2005; dalam Sinulingga et al., 2022). Teknologi informasi adalah penerapan penggunaan sistem informasi keuangan daerah oleh pemerintah daerah, dengan menggunakan segala jenis teknologi informasi dan komputer untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah kepada masyarakat (Rifandi, 2018). Teori pendukung lainnya menurut Thompson et al., (1991) dalam Ariesta (2013) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan pengguna sistem informasi atau perilaku dalam menggunakan teknologi informasi pada saat melakukan tugasnya. Pengukurannya berdasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola data, mengumpulkan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja terkomputerisasi yang menghasilkan informasi berkualitas tinggi untuk digunakan oleh individu, bisnis, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kepuasan para pengguna laporan keuangan karena kualitas, ketepatan, dan keakuratan data yang terdapat di

dalam laporan keuangan tersebut (Rifandi, 2018). Pemerintah DKI Jakarta saat ini menggunakan *software* SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) internal dalam Menyusun laporan keuangan. *Software* SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengelola, dan mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang tersedia bagi publik dan menjadi dasar pengambilan keputusan terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan. Dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi maka akan meningkatkan kualitas nilai informasi laporan keuangan.

2. 2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi acuan dasar dalam melakukan penelitian terhadap nilai informasi laporan keuangan. Penelitian terdahulu memberikan kontribusi dalam pengambilan judul penelitian serta penarikan hipotesis. Beberapa penelitian di bawah ini merupakan penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh peneliti lain sehubungan dengan topik bahasan yang serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian tersebut antara lain sebagai berikut :

Misingah (2022) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah di SKPD Kabupaten Ponorogo. Populasi penelitian ini adalah pegawai pengelola keuangan dari 44 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan, sampel narasumber sebanyak 88 responden. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data. Analisis data menggunakan *multiple analysis regression*. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

Hanum (2021) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah di SKPD Kota Binjai. Populasinya adalah seluruh SKPD Kota Binjai berjumlah 21 SKPD dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dilakukan untuk menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel pada penelitian ini adalah kepala bagian dan pegawai yang bertanggungjawab dalam pembuatan laporan keuangan yang memenuhi kriteria. Jumlah sampel yang digunakan adalah 60 responden yang berdasarkan dari kriteria yang telah ditentukan. Analisis data menggunakan kuesioner dan hasil wawancara. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Binjai. Artinya, jika sistem pengendalian intern pemerintah semakin baik maka nilai informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik juga.

Patiro et al., (2021) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung. Populasi pada penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada semua OPD Kota Bitung. Sampel diambil dengan metode *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan adalah 60 responden. Analisis data yang digunakan adalah survei kuesioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung. Secara simultan sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung.

Wahyuni et al., (2020) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi laporan keuangan. Populasi penelitian ini adalah 24 OPD Kota Makassar. Sedangkan, sampel penelitian ini berjumlah 48 responden dengan kriteria kepala penatausahaan dan staf akuntansi yang bertanggungjawab langsung dalam pembuatan laporan keuangan. Analisis data

menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Pramudiarta dan Juliarto (2015) penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi. Faktor-faktor yang diteliti adalah pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Untuk menentukan responden, metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah *sampling kuota*. Pengumpulan data dilakukan dengan survei kuesioner. Kuesioner disampaikan kepada 65 pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal khususnya pada bagian keuangan/akuntansi. Data diolah dengan menggunakan SPSS versi 19.0. Analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Sedangkan, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan entitas akuntansi pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena faktor belum efektifnya pemanfaatan teknologi informasi yang meliputi teknologi komputer dan teknologi komunikasi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Agustin et al., (2020) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebar 66 kuesioner dan memperoleh kembali 64 kuesioner yang telah diisi oleh responden. Responden dalam penelitian ini adalah kepala bagian keuangan, staf akuntansi dan pihak terkait dalam laporan keuangan pada OPD pemerintah Kabupaten Lumajang. Analisis data yang digunakan adalah analisis linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Sedangkan, pemanfaatan teknologi informasi tidak

berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dewi dan Rini (2018) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tabanan. Populasi pada penelitian ini adalah dinas-dinas di Kabupaten Tabanan. Teknik analisis data yang digunakan adalah *partial least square*. Hasil dari analisis yang dilakukan, didapat bahwa teknologi informasi memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang. Sedangkan, pengendalian intern memiliki hubungan yang signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang.

Satria (2020) penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian intern secara parsial terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Kabupaten/Kota di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis statistik inferensial yaitu dengan menggunakan regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD Pemerintah Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Musi Banyuasin. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 126 responden. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh pengendalian intern yang melingkupi lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, sistem komunikasi dan informasi akuntansi, aktivitas pengendalian dan pemantauan (monitoring).

Kartika dan Amalia (2018) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan, sampelnya adalah 65 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner langsung ke Sekretariat SKPD Kota Magelang. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah Kota Magelang.

Armando (2013) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah SKPD Kota Bukittinggi berjumlah 29 SKPD yang terdiri dari Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan, dan Inspektorat. Penelitian ini menggunakan *total sampling* dikarenakan populasinya kurang dari 100 objek. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 87 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bukittinggi. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bukittinggi melalui pengawasan keuangan daerah. Dimana semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah maka akan semakin baik pula pengawasan keuangan daerah.

Dewi et al., (2015) penelitian ini bertujuan untuk memperoleh temuan eksplanatif yang teruji tentang pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah pada SKPD di Kabupaten Buleleng. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif kausal. Populasi pada penelitian ini adalah SKPD di Kabupaten Buleleng dan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan menggunakan 15 SKPD yang terdiri dari 60 responden. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah data berupa hasil kuesioner terkait sistem pengendalian intern dan nilai informasi laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Buleleng, dan data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen pendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis jalur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pada SPD di Kabupaten Buleleng.

Ariesta (2013) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada SKPD di Kabupaten Pasaman Barat yang berjumlah 38 SKPD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *total*

sampling. Metode pengumpulan data dengan penyebaran kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan uji t. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu.

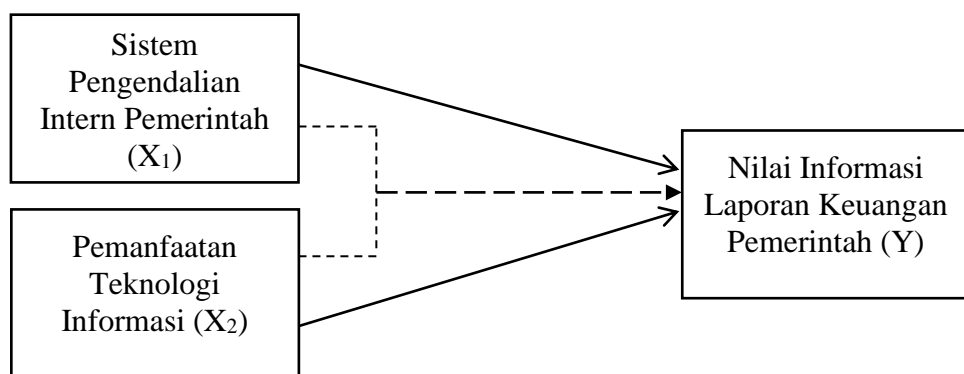
Nahartyo dan Indriasari (2008) penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi informasi terhadap nilai pelaporan keuangan pemerintah daerah. Nilai informasi mengacu pada kehandalan dan ketepatan waktu, sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada 73 kepala dan staf bagian akuntansi SKPD di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir serta mewawancarai beberapa dari mereka. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan SPSS versi 13. Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dari beberapa peneliti yang sudah melakukan uji terhadap variabel sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan bahwa rata-rata tiap variabel berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah, tetapi ada juga yang tidak berpengaruh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki sistem pengendalian intern pemerintah serta pemanfaatan teknologi informasi seperti perangkat komputer, jaringan internet dan *software* aplikasi yang diterapkan berbeda setiap pemerintah daerah.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dikarenakan ingin mengetahui dan mendeskripsikan kepada pengguna laporan keuangan tentang sistem pengendalian intern pemerintah dan teknologi informasi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah DKI Jakarta.

2. 3. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual dimaksudkan untuk memperlihatkan hubungan pengaruh setiap variabel yang akan diteliti, dimana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (X_1), pemanfaatan teknologi informasi (X_2). Sedangkan, variabel dependen yang digunakan adalah nilai informasi laporan keuangan (Y). Berdasarkan landasan teoritis dan uraian dari hasil penelitian terdahulu, maka didapat kerangka konseptual pada Gambar 2.1



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian

Keterangan:

- : Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
- - - - -→ : Pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen.

2. 4. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual penelitian maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

2. 4. 1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.

Menurut teori keagenan SPIP berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah dimana pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan laporan keuangan yang bernilai. Untuk mencapai nilai informasi laporan keuangan yang baik diharapkan pemerintah mampu untuk menerapkan praktik SPIP dengan tepat. Sehingga dengan praktik yang baik dapat mencegah terjadinya kesalahan yang dapat merugikan keuangan negara. Dengan demikian, jika penerapan SPIP berjalan dengan baik maka laporan keuangan yang dihasilkan akan mempunyai nilai informasi yang baik, begitu juga sebaliknya, jika penerapan SPIP tidak berjalan dengan baik maka akan memungkinkan laporan keuangan yang dihasilkan tidak memiliki nilai informasi yang baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al., (2015) bahwa SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan alat pemantau agar tujuan dan sasaran organisasi dapat tercapai dan untuk mewujudkan tata pemerintah yang baik serta dapat memberikan jaminan yang memadai mengenai tercapainya efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Raspati dan Riyanto, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Patiro et al., (2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Sedangkan, menurut Yendrawati (2013) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan uraian mengenai sistem pengendalian intern pemerintah dan pengaruhnya terhadap nilai informasi laporan keuangan diatas dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki pengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.

2. 4. 2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.

Teori Keagenan menjelaskan bahwa pemerintah berperan sebagai agen harus mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menurut teori keagenan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nahartyo dan Indriasari (2008) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang bernilai. Untuk mencapai laporan keuangan yang bernilai, pemerintah menerapkan penggunaan SIPD untuk memanfaatkan semua jenis informasi dan teknologi komputer untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntansi dapat berdampak pada kepuasan pengguna laporan keuangan karena kualitas, kecepatan dan keakuratan data yang terdapat dalam laporan keuangan (Rifandi, 2018).

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini akan membantu mencapai visi dan misi dari sebuah organisasi. Pemanfaatan teknologi informasi ini juga dapat membantu para pegawai pemerintahan untuk menyajikan sebuah informasi laporan keuangan yang baik dan sistematis. Dengan pemanfaatan teknologi informasi ini akan mempermudah pekerjaan pengolahan data dan tata kelola keuangan sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas dan juga meminimalisir adanya resiko yang disebabkan oleh faktor manusia. Dengan kata lain, pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dapat membantu meningkatkan pengelolaan keuangan dan menghasilkan pelaporan keuangan yang memiliki nilai informasi yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Misringah (2022), Patiro et al., (2021) dan Rifandi (2018) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Rini (2018), Pramudiarta dan Juliarto (2015) dan S et al., (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi

tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.

2. 4. 3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Secara Simultan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Pengaruh SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan yang berlandaskan dari teori keagenan dimana pemerintah wajib menyajikan informasi yang baik dalam laporan keuangan. Dengan demikian SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh secara simultan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Misringah (2022) yang menyatakan bahwa SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Sistem pengendalian intern pemerintah menentukan nilai informasi laporan keuangan yang baik. Sistem pengendalian internal yang berkaitan dengan laporan keuangan adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang keandalan laporan keuangan. Salah satu elemen sistem pengendalian internal adalah penilaian risiko dan informasi dan komunikasi (Armando, 2013). Semakin baik penerapan sistem pengendalian intern pemerintah akan baik pula nilai informasi yang dihasilkan.

Pemanfaatan teknologi informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran maupun keuangan, membantu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan. Dimana dengan pemanfaatan teknologi informasi yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki nilai informasi yang baik pula.

Penelitian yang dilakukan oleh Misringah (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Hal ini mendukung hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Ariesta (2013) bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara simultan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah. Dengan merujuk kepada teori dan penelitian terdahulu, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh secara simultan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.

Rumusan Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual dan hipotesis penelitian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.

H₂: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.

H₃: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah.